



IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DESA PESISIR TERTINGGAL
DI PROVINSI BENGKULU

Wina Prima Nurmala, Retno A. Ekaputri, Putri Suci Asriani

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI
PADI SAWAH DI PROVINSI BENGKULU

Hendri, Sigit Nugroho, Aris Almahmudi

ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN KELUARGA
DI KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI BENGKULU

Nindya Faulin, Handoko Hadiyanto, M. Rusdi

KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN KONDISI USAHA NELAYAN SERTA
ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA
NELAYANDI KABUPATEN BENGKULU TENGAH

Reni Darmayanti, Muhamad Abduh, Lela Rospida

ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN
DI PROVINSI BENGKULU

Novrian Pratama, Heri Sunaryanto, BIE Indraswanti

ANALISIS PERMASALAHAN-PERMASALAHAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH SEKTOR JASA DI KOTA BENGKULU

Dian Mardiaty Sari

ANALISIS PENGARUH PEMERINTAH PENGELUARAN, INFRASTRUKTUR,
DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BARU
KABUPATEN REFORMASI DI BENGKULU PROPINSI

Yesi Indian Ariska, Yefriza, Yusnida

DAMPAK PROGRAM PENINGKATAN LUMBUNG PANGAN TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA SUMBER REJO
KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS

Lismawati, Mochamad Ridwan, Benardin

PENERBIT PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU

JURNAL
EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

VOLUME: 06. NO. 03, JANUARI-JUNI 2016
ISSN: 1979-7338

IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DESA PESISIR TERTINGGAL DI PROVINSI BENGKULU Wina Prima Nurmala, Retno A. Ekaputri, Putri Suci Asriani	1-14
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PADI SAWAH DI PROVINSI BENGKULU Hendri, Sigit Nugroho, Aris Almahmudi	15-26
ANALISIS TINGKAT KEMISKINAN KELUARGA DI KABUPATEN KEPAHANG PROVINSI BENGKULU Nindya Faulin, Handoko Hadiyanto, M. Rusdi	27-39
KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN KONDISI USAHA NELAYAN SERTA ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA NELAYANDI KABUPATEN BENGKULU TENGAH Reni Darmayanti, Muhamad Abduh, Lela Rospida	40-50
ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI BENGKULU Novrian Pratama, Heri Sunaryanto, BIE Indraswanti	51-59
ANALISIS PERMASALAHAN-PERMASALAHAN USAHA KECIL DAN MENENGAH SEKTOR JASA DI KOTA BENGKULU Dian Mardiaty Sari	60-71
ANALISIS PENGARUH PEMERINTAH PENGELUARAN, INFRASTRUKTUR, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BARU KABUPATEN REFORMASI DI BENGKULU PROPINSI Yesi Indian Ariska, Yefriza, Yusnida	72-85
DAMPAK PROGRAM PENINGKATAN LUMBUNG PANGAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PADI DI DESA SUMBER REJO KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS Lismawati, Mochamad Ridwan, Benardin	86-102

PETUNJUK BAGI PENULIS JURNAL EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Artikel yang ditulis meliputi hasil telaah dan hasil penelitian dibidang ekonomi dan perencanaan pembangunan. Naskah diketik dengan program *Microsoft Word*, huruf *Garamond*, ukuran 12 pts, dengan spasi satu dicetak pada kertas A4 dengan panjang maksimum 16 halaman. Pengiriman naskah juga dapat dilakukan sebagai *lattachment e-mail* ke alamat: mppunib@yahoo.com
2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia. Sistematika artikel hasil penelitian adalah judul, nama penulis, abstrak disertai kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan, serta daftar rujukan.
3. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik dan ditempatkan di bawah judul artikel. Dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama.
4. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Panjang masing-masing abstrak 75-100 kata, sedangkan jumlah kata kunci 3-5 kata. Abstrak minimal berisi judul, tujuan, metode, dan hasil penelitian.
5. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, konteks penelitian, hasil kajian pustaka, dan tujuan penelitian. Seluruh bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegrasi dalam bentuk paragraf-paragraf, dengan panjang 15-20% dari total panjang artikel.
6. Bagian metode berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang rancangan penelitian, sumber data dan analisa data yang secara nyata dilakukan peneliti, dengan panjang 10-15% dari total panjang artikel.
7. Bagian kesimpulan berisi temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau berupa intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf.
8. Daftar rujukan hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk, dan semua sumber yang dirujuk harus tercantum dalam daftar rujukan. Sumber rujukan minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang digunakan adalah sumber-sumber primer berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi). Artikel yang dimuat di jurnal Ekonomi dan Perencanaan pembangunan disarankan untuk digunakan sebagai rujukan.
9. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama akhir, tahun). Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh: (Devis, 2003: 47).

Jurnal Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan (JEPP)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu

Gedung S Jl. Raya Kandang Limun Kota Bengkulu
Telp. 0736-28481 Fax: 0736-28481 E-mail: mppunib@yahoo.com

Ketua Penyunting:
Handoko Hadiyanto

Penyunting
Mochamad Ridwan
Retno A. Ekaputri

Sekretariat
Romi Gunawan

Dicetak Oleh:
SINEV PRINTING
Perum Areka Regensi Blokc 1, No.12 Kota Bengkulu

ANALYZE THE EFFECTS OF GOVERNMENT EXPENDITURE, INFRASTRUCTURE, AND LABOR ON ECONOMIC GROWTH OF THE NEW DISTRICTS REFORM IN BENGKULU PROVINCE

Yesi Indian Ariska, Yefrizza, Yusnida

Abstract

This research aims to analyze the effects of government expenditure, infrastructure, and labor on economic growth of the new districts reform during the period 2004-2013. Government expenditure variable using numbers the realization of total government spending. The variable of infrastructure using ratio under the authority of the district division of the condition road. The variable of labor using number of employment opportunities. The samples involved are 5 new districts by regional from Bengkulu Province. Data used are secondary data, while the data analysis used is regression panel data. The result showed that government expenditure, infrastructure, and labor influence positively and significant on economic growth of the new districts by regional reform. Every 1% increase in total government expenditure will increase 0,0011 % of economic growth. Any 1% increase in the ratio of the length of roads under the new districts by regional reform governments' authority will increase 0,0025 % of economic growth. Every 1% increase in the number of employment will increase 0,00295% of economic growth.

Keywords: Regional Reform, Economic Growth, Government Expenditure, Infrastructure, Labor

ANALISIS PENGARUH PEMERINTAH PENGELUARAN, INFRASTRUKTUR, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI BARU KABUPATEN REFORMASI DI BENGKULU PROPINSI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dari reformasi kabupaten baru selama periode 2004-2013. variabel belanja pemerintah menggunakan angka realisasi total belanja pemerintah. Variabel infrastruktur menggunakan rasio di bawah kewenangan pembagian distrik kondisi jalan. Variabel tenaga kerja menggunakan jumlah kesempatan kerja. Sampel yang terlibat adalah 5 kabupaten baru oleh daerah dari Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan analisis data yang digunakan adalah data panel regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, infrastruktur, dan pengaruh tenaga kerja positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten baru dengan reformasi regional. Setiap kenaikan 1% pada total pengeluaran pemerintah akan meningkatkan 0,0011% dari pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan 1% dalam rasio panjang jalan di bawah kabupaten baru dengan otoritas pemerintah reformasi daerah akan meningkatkan 0,0025% dari pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan 1% dalam jumlah lapangan kerja akan meningkat 0,00295% dari pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Reformasi Regional, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pemerintah, Infrastruktur, Tenaga Kerja

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemekaran daerah adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah beberapa daerah dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukan upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dengan cara pemekaran (Koswara, 2001). Argumentasinya adalah ketika lingkup

wilayah kerja pemerintah daerah menjadi lebih kecil maka rentang kendali pemerintah menjadi lebih pendek. Hal ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan daerah.

Dengan pemahaman tersebut pemekaran wilayah diharapkan mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik melalui pemecahan wilayah kewenangan menjadi wilayah-wilayah otonom yang lebih kecil. Pada skala yang lebih kecil, proses perencanaan dan

penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang dimekarkan akan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Terakhir kali pemerintah mengeluarkan undang-undang yang menetapkan daerah otonom baru hasil pemekaran adalah pada bulan Desember 2012. Sejak masa reformasi hingga Desember 2012 tersebut, tercatat ada 217 daerah otonom baru hasil pemekaran, baik berupa provinsi maupun kabupaten/kota. Akibatnya, jumlah daerah di Tanah Air semakin banyak, yakni 34 provinsi dan 502 kabupaten/kota.

Namun, dalam perkembangannya banyak sekali daerah hasil pemekaran yang dinilai berkinerja buruk (Ardiansyah, 2009). Hal ini tentu saja kontra produktif terhadap tujuan pemekaran itu sendiri. Salah satu faktor yang sering dituding sebagai penyebabnya adalah usulan pemekaran daerah seringkali tidak didasari studi kelayakan yang jelas dan lebih banyak mendasarkan pada alasan sentimen kesukuan atau kepentingan elit lokal di sana.

Kemiskinan adalah salah satu target yang harus dibasmi berkaitan dengan otonomi daerah dan pemekaran wilayah. Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa kemiskinan masih tetap ada walaupun otonomi daerah telah dilaksanakan. Berbagai kebijakan yang terkait dengan prioritas pembangunan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, termasuk pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, pertambangan, pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya modal, dan peningkatan ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan kebijakan diberbagai bidang yang meningkatkan kegiatan ekonomi diberbagai sektor diperkirakan akan menurunkan jumlah pengangguran terbuka yang mencapai angka 6,91% dari total angkatan kerja pada tahun 2006. Pada tahun 2007 ini jumlah pengangguran terbuka menurun mencapai 5,12%. Pengangguran pada tahun 2008 pada angka 5,5% selanjutnya, dengan menurunnya tingkat pengangguran dan pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan diharapkan mampu menurunkan jumlah penduduk miskin.

Terdapat berbagai sudut pandang yang sering digunakan untuk melihat kinerja daerah hasil

pemekaran dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tinjauan pertama yang sering digunakan adalah aspek pengeluaran atau belanja pemerintah (*publik expenditure*). Rujukan yang sering dipakai adalah teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan Rostow dan Musgrave. Teori tersebut mencoba mengaitkan antara pengeluaran pemerintah dengan tiga tahapan pembangunan ekonomi, yaitu: tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pemerintah daerah hasil pemekaran dalam pemahaman teori tersebut dapat dikatakan berada pada tahap awal sehingga pengeluaran untuk investasi merupakan bagian yang terbesar dari total belanja. Pengeluaran investasi tersebut ditujukan untuk pengadaan sarana maupun prasarana publik, seperti: infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Tujuan pokok yang ingin dicapai dari kebijakan pemekaran daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, peningkatan kesejahteraan dapat dilakukan dengan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pemahaman ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur antara lain dengan besaran yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Guna mencapai target pertumbuhan ekonomi, daerah hasil pemekaran harus mempersiapkan dan menyediakan institusi, infrastruktur, dan sarana pendukung lainnya untuk menggerakkan semua sektor kehidupan dalam masyarakat, khususnya sektor perekonomian secara efisien.

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa kebijakan pemekaran daerah seharusnya mampu menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara lebih optimal serta dapat mengakomodasi aspirasi dan kreatifitas baru untuk mengembangkan kemampuan daerah sebagai bagian dari tujuan kebijakan otonomi daerah. Namun berbagai studi dan evaluasi tentang kinerja kabupaten/kota hasil pemekaran ternyata memperlihatkan gambaran

yang berbeda. Kebijakan pemekaran daerah dinilai kurang berhasil mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan pemekaran daerah di kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu yang seharusnya mampu menjadi pendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu.

Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari berbagai studi evaluasi tentang kinerja kabupaten hasil pemekaran yang memperlihatkan kurang berhasilnya dalam mencapai tujuan yang diharapkan, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti yakni: Bagaimana pengaruh belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu?

Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah, infrastruktur dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Pemekaran di Provinsi Bengkulu.

Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi daerah hasil pemekaran yakni Provinsi Bengkulu khususnya kabupaten yang mengalami pemekaran yakni Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang dengan variabel penelitian yakni belanja pemerintah, infrastruktur dan tenaga kerja. Data yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari tahun 2004- 2013.

Dasar pemilihan 5 kabupaten pemekaran dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan regresi data panel yang melibatkan data dengan runtut waktu yang cukup panjang yakni 10 tahun. Mempertimbangan hal tersebut guna keseragaman data Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai kabupaten pemekaran di Provinsi Bengkulu sejak 24 Juni 2008 tidak dijadikan wilayah atau daerah penelitian.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pemekaran Daerah

Alasan pemekaran daerah tidak pernah tunggal, bahkan seringkali tumpang tindih antara alasan yang bersifat sosial, politik, maupun ekonomi. Alasan pertama yang sering disampaikan dalam usulan pemekaran daerah adalah kondisi geografis yang terlalu luas yang berdampak pada kualitas layanan publik. Dalam kajian Bappenas dan UNDP (2008) disebutkan pula bahwa salah satu argumen yang mendukung pemekaran, yaitu antara lain karena adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat.

Alasan kedua yang sering dikemukakan adalah masyarakat di suatu daerah merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam satu wilayah pemerintahan daerah.

Alasan ketiga adalah alasan politik. Alasan ini memang tidak pernah secara eksplisit disampaikan sebagai alasan pemekaran suatu daerah. Namun nuansa motif politik dalam pengusulan pemekaran suatu daerah akan terasa jika melihat elit dan kekuatan politik yang terlihat begitu besar perannya dalam proses pengusulan pemekaran daerah. Sudah menjadi rahasia umum jika alasan dilakukannya pemekaran adalah keinginan sekelompok elit politik untuk memperoleh posisi kekuasaan baru di daerah yang dimekarkan. Hal ini karena keberadaan daerah otonomi baru hasil pemekaran daerah membuka peluang dibentuk aparat pemerintah daerah baru.

Alasan keempat yang mendorong dilakukannya pemekaran adalah adanya keinginan mengambil keuntungan (*rent seeking*) dari insentif fiskal yang diberikan pemerintah pusat dan daerah induk. Sama seperti alasan sebelumnya, alasan insentif fiskal ini juga tidak pernah secara eksplisit disampaikan. Insentif fiskal tersebut antara lain adanya anggaran tersendiri dari pemerintah pusat yang terpisah dari pemerintah daerah induk. Sebagaimana diketahui, daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus).

Belanja Pemerintah

Teori Belanja Pemerintah

Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai melainkan harus memperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang bekerja atau meningkat pendapatannya.

Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi

Teori Peacock dan Wiseman menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GDP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Belanja pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2004) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur

Pembahasan mengenai infrastruktur cenderung mengarah pada pembahasan barang publik. Hal ini dijelaskan bahwa beberapa infrastruktur seperti jalan tol merupakan salah satu barang publik yang disediakan oleh pemerintah meskipun infrastruktur ini bukanlah barang publik murni (*impure publik goods*).

Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Ketersediaan infrastruktur menghasilkan eksternalitas positif karena dapat meningkatkan produktivitas dan pelaku usaha dengan berkurangnya beban usaha yang harus ditanggung. Studi yang pernah dilakukan Bank

Dunia (Kodoatie, 2003) menunjukkan betapa pentingnya infrastruktur dalam pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut menyimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan percepatan pertumbuhan ekonomi dunia abad ke-20 dibandingkan beberapa abad sebelumnya adalah karena kemajuan teknologi dan pertumbuhan pembangunan infrastruktur.

Otonomi Daerah dan Kondisi Infrastruktur

Melihat pentingnya ketersediaan infrastruktur mengharuskan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab menyediakan infrastruktur untuk mengalokasikan dana yang sangat besar untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Sayangnya, kemampuan keuangan pemerintah sangat terbatas sehingga tidak mampu menyediakan infrastruktur yang memadai. Selain persoalan pendanaan, penyediaan infrastruktur juga kerap terkendala oleh buruknya kinerja pemerintahan di daerah. Sejak berlakunya otonomi daerah, penyediaan infrastruktur terkesan bukan lagi prioritas utama pembangunan. Padahal, tujuan otonomi daerah adalah memberikan pelayanan publik yang lebih intensif dan nyata kepada masyarakat, termasuk penyediaan infrastruktur dasar. Ketersediaan infrastruktur sangat penting bagi kemajuan pembangunan serta peningkatan ekonomi daerah. Sebelum otonomi daerah, dana pembangunan jalan daerah diatur oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Provinsi atau Inpres Jalan Kabupaten. Setelah otonomi daerah, alokasi diserahkan pada setiap daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini menjadikan daerah memiliki wewenang penuh dalam pelaksanaan pembangunan jalan.

Teori Tenaga Kerja

Lewis mengemukakan teorinya mengenai ketenagakerjaan, yaitu; kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan masalah. Kelebihan pekerja satu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan *output* dan penyediaan pekerja di sektor lain. Lewis mengemukakan bahwa ada dua sektor di dalam perekonomian negara sedang berkembang, yaitu sektor modern dan sektor tradisional. Sektor tradisional tidak hanya berupa sektor pertanian di pedesaan, melainkan juga termasuk sektor informal di perkotaan (pedagang kaki lima, pengecer, pedagang angkringan).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan tenaga kerja sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Kesempatan kerja merupakan terjemahan bagi *employment* yang berarti sebagai jumlah orang yang bekerja tanpa memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang dimiliki tiap orang, pendapatan dan jam kerja mereka. Kesempatan kerja juga dapat dimaknai sebagai permintaan tenaga kerja (*demand for labor*), yaitu suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan kerja yang siap diisi para pencari kerja. Besarnya kesempatan kerja tergantung pada beberapa faktor, di antaranya: pertumbuhan *output*, tingkat upah dan harga-harga dari faktor produksi lainnya.

Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi

Selanjutnya dikatakan bahwa pengaruh positif atau negatif dari pertumbuhan penduduk tergantung pada kemampuan sistem perekonomian daerah tersebut dalam menyerap dan secara produktif memanfaatkan penambahan tenaga kerja tersebut. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input dan faktor penunjang seperti kecakapan manajerial dan administrasi.

Pertumbuhan Ekonomi

Teori Solow

Model pertumbuhan Solow menggunakan dua buah faktor produksi utama, yakni: modal dan tenaga kerja, serta sebuah unsur baru yakni teknologi. Modal dan tenaga kerja dapat saling mensubstitusi satu sama lain. Solow mengasumsikan bahwa setiap faktor produksi akan mengalami *diminishing return*, yakni jika input ditambahkan terus menerus maka output akan bertambah tetapi dengan tingkat pertumbuhan yang semakin mengecil. Oleh karena itu investasi yang terus-menerus belum tentu akan dapat memberikan pertumbuhan yang permanen.

Menurut teori Solow ada beberapa hal yang dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pertama, meningkatkan porsi tabungan akan meningkatkan akumulasi modal dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kedua, meningkatkan investasi yang sesuai dalam perekonomian baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik. Ketiga, mendorong kemajuan teknologi dapat meningkatkan pendapatan per tenaga kerja sehingga pemberian kesempatan untuk berinovasi pada

sektor swasta akan berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Terdahulu

Yuliadi, 2012 mengadakan penelitian dengan judul kesenjangan investasi dan evaluasi kebijakan pemekaran wilayah di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan tentang implikasi kebijakan pemekaran Provinsi Gorontalo menyiratkan bahwa dampak dari kebijakan pemekaran wilayah Provinsi Gorontalo dari Provinsi Sulawesi Utara dalam jangka pendek relatif belum menunjukkan pengaruh yang berarti namun dalam jangka menengah dan panjang berpengaruh cukup besar terhadap kesenjangan investasi penanaman modal asing dalam konteks perekonomian di kawasan timur Indonesia.

Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Candra (2012) dengan judul peranan pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2001-2010. Hasil penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah, tenaga kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga variabel di atas berpengaruh positif dan signifikan, kecuali variabel penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini hal yang akan dibahas yakni apakah pengeluaran pemerintah, infrastruktur dan tenaga kerja mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah pemekaran di Provinsi Bengkulu dengan menggunakan model regresi data panel yang nantinya dapat menarik kesimpulan apakah wilayah pemekaran di Provinsi Bengkulu telah berhasil dalam mencapai tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisis pada data-data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistik.

Defenisi Operasional

1. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Bengkulu yang dinyatakan dalam persen menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu Tahun 2004 sampai dengan 2013.
2. Belanja pemerintah yaitu realisasi total belanja pemerintah Provinsi Bengkulu dalam juta rupiah yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung dari tahun 2004 sampai dengan 2013 .
3. Infrastruktur adalah total panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang di 5 kabupaten pemekaran (Provinsi Bengkulu) diukur dalam satuan kilometer (Km).
4. Tenaga kerja adalah jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama yang ada di kabupaten hasil pemekaran Provinsi Bengkulu dalam satuan orang.

Jenis dan Sumber Data

Data sekunder yang dipakai adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 5 pemerintah kabupaten hasil pemekaran yang dijadikan daerah dalam penelitian ini. Data LKPD yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini diperlukan untuk

mengetahui besar realisasi belanja pemerintah dari kabupaten yang dijadikan daerah penelitian. Data yang dianalisis berasal dari LKPD periode tahun 2004-2013.

Selain itu, data sekunder yang lain adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya yang berkaitan dengan data pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Untuk data jumlah panjang jalan didapat dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu. Berbeda dengan belanja pemerintah, data mengenai pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan tenaga kerja yang dianalisis berasal dari periode 2004-2013 hal ini karena nilai belanja pemerintah baru teraktualisasikan setelah setahun berjalan sehingga harus dilihat dari data setahun sebelumnya.

Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan dokumentasi.

Metode Analisis

Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Di sisi lain, penelitian ini melibatkan data yang bersifat *time series* (runtut waktu) dan *cross section* (lintas bagian). Sifat *time series* terlihat dari diambilnya kurun waktu 10 tahun, sedangkan *cross section* terlihat dari dijadikannya 5 kabupaten sebagai daerah penelitian. Mempertimbangkan hal itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data *time series* dengan data *cross section*.

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln BLJ_{it} + \beta_2 \ln JLN_{it} + \beta_3 \ln BKJ_{it} + \mu_{it}$$

dimana:

ln = logaritma natural

PE = Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)

β = konstanta

BLJ = belanja pemerintah (dalam ribu rupiah)

JLN = panjang jalan kabupaten dengan kondisi baik dan sedang (dalam km)

BKJ = jumlah orang yang bekerja (dalam orang)

μ = residu

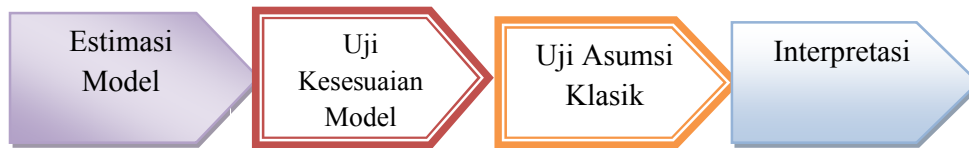
i = unit *cross section* (kabupaten hasil pemekaran)

t = tahun yang diteliti

Untuk melakukan analisis data dengan metode tersebut, penelitian ini akan menggunakan bantuan program *Eviews 7.0*

Tahapan Analisis dengan Regresi Data Panel

Sebagaimana analisis dengan menggunakan regresi sederhana, untuk melakukan analisis regresi data panel juga harus mengikuti tahapan-tahapan tertentu.



Gambar 3.1 Tahapan Analisis Regresi

Estimasi Model Regresi Data Panel

a. *Common Effects Model*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, dan menggunakan teknik kuadrat terkecil atau *least square* untuk mengestimasi koefisiennya.

b. *Fixed Effects Model*

Asumsi pembuatan model yang menghasilkan intersep konstan untuk setiap individu (*i*) dan waktu (*t*) dianggap kurang realistis sehingga dibutuhkan model yang lebih dapat menangkap perbedaan tersebut. Model efek tetap (*Fixed Effects*), model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnnya.

c. *Random Effects Model*

Untuk mengatasi masalah ini bisa digunakan variabel residual yang dikenal sebagai model *Random Effects*. Pada model ini, akan dipilih estimasi data panel dimana residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu.

Penentuan Model Regresi Data Panel yang Sesuai

- Uji Statistik F atau *Likelihood Ratio*.
Alat pengujian untuk menentukan apakah model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.
- Uji Hausman.
Alat pengujian statistik untuk memilih apakah model *Fixed Effect* atau model *Random Effect* yang paling tepat digunakan.
- Uji *Lagrange Multiplier*.
Pengujian untuk mengetahui mana yang lebih baik antara model *Random Effect* dengan model *Common Effect*.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji ini menggunakan hasil residual dan *chi-square probability distribution*, hipotesis yang akan diuji adalah : H_0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal H_a : Sampel berasal dari populasi yang tidak

berdistribusi normal. Kriteria pengujian adalah bila nilai *chi square* tabel $>$ nilai JBhitung, maka H_0 yang menyatakan residual berdistribusi normal diterima. Sebaliknya, bila nilai *chi square* tabel $<$ nilai JBhitung, maka H_0 yang menyatakan residual berdistribusi normal ditolak.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji, apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variabel*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi di antara variabel-variabel bebas. Bila terjadi hubungan linear yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi maka dikatakan terdapat masalah multikolinieritas dalam model tersebut.

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah:

- H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).
- H_0 ditolak jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$, maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima)

Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji t juga dapat dilakukan dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel pada output hasil regresi menggunakan Eviews dengan *Significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Jika nilai signifikansi lebih besar dari α maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara individual tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih

kecil dari \square maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan), berarti secara individu variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Data

Perkembangan PDRB

Selama periode pengamatan, trend pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran Provinsi Bengkulu cenderung mengalami fluktuasi. Namun secara umum, trend pertumbuhan ekonomi antar kabupaten cenderung mengalami kenaikan. Penurunan pertumbuhan ekonomi secara rata-rata terjadi pada tahun 2008 hingga tahun 2009 pada setiap daerah pengamatan.

Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Kaur dari 5,45% pada tahun 2008 menjadi 4,27% pada tahun 2009 atau mengalami penurunan sebesar 1,18% dari tahun sebelumnya. Fenomena tersebut lebih disebabkan oleh krisis moneter yang terjadi secara nasional. Dengan semakin membaiknya kinerja perekonomian, mulai tahun 2010 hingga tahun 2013, pertumbuhan ekonomi kabupaten pemekaran Provinsi Bengkulu cenderung mengalami peningkatan.

Perkembangan Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah di tingkat kabupaten pengamatan yakni kabupaten pemekaran provinsi Bengkulu cenderung mengalami peningkatan. Pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah merupakan pengeluaran yang dominan atau memiliki persentase yang lebih tinggi dari pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan publik bahkan pada tahun 2004 sampai 2010 porsi belanja pegawai rata-rata berkisar 30%-60% (Depkeu,2010) bahkan sempat mencapai lebih dari 60% dari total belanja pada tahun 2004 sampai 2005.

Berdasarkan Gambar 4.4 diketahui bahwa pengeluaran pemerintah daerah pemekaran provinsi Bengkulu yang paling tinggi terdapat di daerah Kabupaten Muko-muko dengan persentase dari total pengeluaran pemerintah daerah pengamatan sebesar 21,31% atau 316,3 Milyar Rupiah, nilai ini tidak jauh berbeda dengan total belanja Kabupaten Seluma dengan rata-rata pengeluaran untuk periode pengamatan sebesar 310,4 Milyar Rupiah. Sedangkan daerah dengan rata-rata pengeluaran pemerintah terendah masing-masing adalah Kabupaten Kaur 271,7 Miliar Rupiah. Perbedaan dan perkembangan pengeluaran pemerintah seiring dengan meningkatnya aktifitas pemerintah dalam perekonomian yang antara lain disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan dalam perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, perubahan demografi, dan perubahan kegiatan sektor swasta.

Perkembangan Infrastruktur

Panjang jalan kabupaten pemekaran di provinsi Bengkulu dari periode tahun 2004 sampai tahun 2013 mengalami fluktuasi hal ini dikarenakan dalam penelitian ini mengambil rasio panjang jalan berdasarkan kondisi jalan. Lambatnya pertumbuhan rasio panjang jalan dengan kualitas baik yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten menurut kondisi terkait dengan minimnya anggaran yang disediakan untuk membangun jalan baru setiap tahunnya dan mengeluarkan dana besar untuk pemeliharaan jalan. Situasi ini menunjukkan bahwa secara umum kebijakan otonomi daerah belum memberi dampak yang signifikan pada pertumbuhan rasio panjang jalan. Demikian halnya dengan kebijakan pemekaran daerah.

Kenyataan tentang lambatnya penambahan panjang jalan di daerah pemekaran tersebut selaras dengan penjelasan pada bagian sebelumnya tentang belanja pemerintah. Porsi Belanja Modal dalam Total Belanja pemerintah kabupaten hasil pemekaran terlihat kurang memadai. Padahal bila mengacu pada model Rostow dan Musgrave tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, pengeluaran untuk investasi (modal) pada daerah baru hasil pemekaran idealnya memiliki porsi yang terbesar dari Total Belanja. Hal ini ditujukan untuk pengadaan sarana maupun prasarana publik, seperti: infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain sebagainya, yang biasanya minim atau belum

tersedia di daerah baru. Namun, dalam kasus daerah-daerah baru hasil pemekaran di Provinsi Bengkulu ternyata tidak seluruhnya sesuai dengan model Rostow dan Musgrave tersebut. Porsi belanja modal terhadap total belanja pemerintah tidak cukup besar. Akibat minimnya porsi belanja modal inilah maka perkembangan infrastruktur termasuk jalan di kabupaten hasil pemekaran tidak jauh berbeda dengan kabupaten lain. Hal lain yang juga dianggap sebagai penghambat peningkatan panjang jalan dengan kualitas baik adalah kondisi kegiatan perekonomian dimana jalan yang telah disediakan oleh pemerintah daerah banya dilalui truk pengangkut hasil tambang yang menyebabkan jalan cenderung cepat rusak.

Perkembangan Tenaga Kerja

Secara keseluruhan, selama periode 2004-2013 terjadi fluktuasi jumlah tenaga kerja yang bekerja di masing-masing daerah pemekaran. Meskipun jika dicermati secara kolektif penurunan serentak terjadi pada tahun 2013 di setiap kabupaten pemekaran. Bahkan, ada pula yang menurun selama beberapa periode, seperti yang terjadi di Kabupaten Kepahiang. Namun fluktuasi jumlah tenaga kerja yang bekerja di sebuah daerah dalam jangka pendek merupakan situasi yang normal.

Dari 5 kabupaten hasil pemekaran yang dijadikan sampel, terlihat bahwa Kabupaten Seluma merupakan daerah dengan rata-rata jumlah penduduk yang bekerja tertinggi selama periode 2004-2013, dengan jumlah rata-rata 81.535 orang setiap tahunnya, berikutnya

adalah Kabupaten Muko-muko dengan jumlah rata-rata penduduk yang bekerja mencapai 63.148 orang setiap tahunnya (Gambar 4.7).

Fakta yang menarik adalah kedua kabupaten tersebut mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor utama dalam menyerap tenaga kerja. Masyarakat di kedua kabupaten ini memiliki kultur agraris yang kuat sejak masa kolonial sehingga sektor pertanian di kedua daerah ini mampu menjadi tumpuan utama dalam penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut selaras dengan kondisi ketenagakerjaan secara nasional dimana sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar dalam menyerap tenaga kerja. Sementara itu, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kaur tercatat sebagai daerah dengan rata-rata jumlah penduduk yang bekerja terendah selama periode 2003-2013. Kabupaten Lebong hanya memiliki rata-rata 53.670 orang setiap tahunnya, sedangkan Kabupaten Kaur memiliki rata-rata 53.280 orang per tahunnya.

Hasil Perhitungan

Penentuan Model Persamaan Regresi

Ketiga model persamaan data panel menunjukkan bahwa semua variabel independen (belanja pemerintah, infrastruktur, dan tenaga kerja) memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi (Lihat Tabel 4.1). Selain itu, nilai *p-value* secara keseluruhan (*F-statistics*) menunjukkan nilai kurang dari α . Hal ini berarti bahwa setiap variabel independen keseluruhan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.1: Nilai Variabel Independen dari Masing-masing Model Persamaan

Date: 02/19/16 Time: 10:42
 Sample: 2004 2013
 Included observations: 10
 Cross-sections included: 5
 Total pool (balanced) observations: 50

Variabel		Common Effect	Fixed Effects	Random Effects
Constanta	<i>Coefficient</i>	-8.298807	3.220843	1.831794
	<i>Std. Error</i>	1.075814	0.746253	0.695988
	<i>P-Value</i>	0.0000	0.00000	0.0095
BLJ Belanja Pemerintah	<i>Coefficient</i>	1.443890	0.110092	0.183637
	<i>Std. Error</i>	0.177043	0.062999	0.059912
	<i>P-Value</i>	0.0000	0.0000	0.0026
Jln Infrastruktur	<i>Coefficient</i>	0.092727	0.256128	0.200098
	<i>Std. Error</i>	0.055073	0.049438	0.042072
	<i>P-Value</i>	0.0946	0.0000	0.0000

Bkj	<i>Coefficient</i>	0.574507	0.295785	0.371886
Tenaga Kerja	<i>Std. Error</i>	0.096129	0.065230	0.059028
	<i>P-Value</i>	0.0000	0.0000	0.0000
	<i>R-Squared</i>	0.640109	0.998138	0.408023
	<i>P-Value (F-Statistics)</i>	0.000000	0.000000	0.000000

Sumber: Eviews 7, Hasil Pengolahan 2016

Guna menentukan model regresi mana yang paling sesuai dengan karakter data yang digunakan, dilakukan sejumlah pengujian. Alat uji pertama adalah Uji Statistik F atau

Likelihood Ratio Test untuk menentukan mana yang lebih baik antara model *Common Effects* dengan model *Fixed Effects*. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 : Hasil Uji Statistik F atau *Likelihood Ratio Test (Uji Chow)*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.154901	(4,42)	0.0063
Cross-section Chi-square	16.669977	4	0.0022

Melihat nilai *p-value* sebesar 0.0063 untuk *Cross-section F*, yang berarti kurang dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat keyakinan 95 persen bahwa Model *Fixed Effects* lebih baik daripada Model *Common Effects*.

Selanjutnya, untuk mengetahui mana yang lebih baik antara model *Fixed Effects* dengan model *Random Effects* dilakukan pengujian dengan *Hausman Test*. Hasilnya tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 : Hasil *Hausman Test*

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.521194	3	0.0000

Sumber: Eviews 7, Hasil Pengolahan 2016

Melihat nilai *p-value* sebesar 0.0000 untuk *cross-section random*, yang berarti kurang dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat keyakinan 95 persen bahwa model *fixed effects* lebih baik daripada model *random effects*. Berdasarkan hasil *likelihood ratio test* dan *hausman test* di atas dapat disimpulkan bahwa model *fixed effects* adalah model yang lebih baik daripada model *common effects* maupun model *random effects*. Hasil uji tersebut sesuai dengan teori.

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Kriteria pengujian adalah bila nilai *chi square* tabel $>$ nilai JBhitung, maka H_0 yang menyatakan residual berdistribusi normal diterima. Sebaliknya, bila nilai *chi square* tabel $<$ nilai JBhitung, maka H_0 yang menyatakan residual berdistribusi normal ditolak. Nilai *chi square* dengan 3 variabel bebas pada tingkat kepercayaan 0,05 = 7,81472. Dikatakan berdistribusi normal jika nilai *chi square* $>$ Jarque-Bera. Selain itu, dapat dikatakan berdistribusi normal jika *p-value* $>$ α . Dari Gambar 4.8 terlihat bahwa nilai Jarque-Bera

adalah 1.434956. Sedangkan *p-value* sebesar 0.487981. Karena $7,81472 > 1.434956$ dan $0.487981 > \alpha$ maka dapat disimpulkan bahwa residual dalam persamaan Model *Fixed Effects* terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji, apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variabel*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi tinggi di antara variabel-variabel bebas. Caranya dengan menghitung koefisien korelasi antar variabel bebasnya.

Kriteria pengujian adalah bila koefisien antar variabel lebih kurang dari 1 maka H_0 yang menyatakan tidak terdapat multikolinieritas diterima. Dari Tabel 4.4. terlihat bahwa koefisien antar variabel terlihat sangat rendah (terletak di antara rentang -0,5 sampai 0,5). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel dalam persamaan model *Fixed Effects* di atas.

Pengujian Hipotesis

a. Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh simultan variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 0,0000 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$). Dengan demikian kita dapat menolak H_0 dan mengambil kesimpulan bahwa variabel belanja pemerintah, infrastruktur dan tenaga kerja secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten hasil pemekaran Provinsi Bengkulu.

Pengujian secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh parsial masing-masing variabel bebas (*independent*)

Pembahasan

Interpretasi Model

$$PE = 3,220843 + 0,110092 \ln BLJ + 0,256128 \ln JLN + 0,295785 \ln BKJ$$

Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari persamaan model di atas, dapat diinterpretasikan bahwa variabel belanja pemerintah memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten hasil pemekaran dengan koefisien sebesar 0,110092. Untuk menginterpretasikan koefisien

terhadap variabel terikat (*dependent*). Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai t hitung variabel belanja pemerintah sebesar 1,74 dengan probabilitas sebesar 0,0841. Artinya probabilitas yang diperoleh lebih besar daripada Alpha 0,05 sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa secara parsial belanja pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, akantetapi hati-hati dalam memaknai hasil regresi ini karena bisa saja hal ini hanya terjadi di kabupaten hasil pengamatan dan tidak berlaku di kabupaten lain.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi R^2 menunjukkan ketepatan atau goodness of fit model yang digunakan. Semakin besar nilai koefisien determinasi R^2 , yang dicerminkan pada angka koefisien determinasi mendekati satu (1) maka akan semakin baik model tersebut dapat menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Berdasarkan hasil analisis pengaruh belanja pemerintah, infrastruktur dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten pemekaran diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 99,813%. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel belanja pemerintah, infrastruktur dan tenaga kerja telah memberikan kontribusi sebesar 99,813% dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi kabupaten hasil pemekaran Provinsi Bengkulu. Sedangkan sisanya 0,187% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. Dengan demikian secara umum model yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan cukup baik untuk menjelaskan bagaimana pengaruh belanja pemerintah, infrastruktur dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten hasil pemekaran provinsi Bengkulu.

slope pada model Lin-Log dapat dinyatakan bahwa setiap kenaikan nilai belanja pemerintah sebesar 1 persen, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,0011 persen (catatan: kita membagi estimasi koefisien kemiringan dengan 100) dengan asumsi *ceteris paribus*. Memperhatikan *p-value* dari *t-Statistics* sebesar 0,0841 yang lebih besar

dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa secara parsial variabel belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi yang sama juga terjadi pada variabel infrastruktur. Variabel yang diproksi dengan rasio panjang jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten hasil pemekaran terhadap kondisi jalan ini memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten hasil pemekaran dengan koefisien sebesar 0,256128. Koefisien slope panjang jalan diinterpretasikan dimana setiap kenaikan nilai panjang jalan berdasarkan kondisi sebesar 1 persen, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 0,0025 persen (catatan: kita membagi estimasi koefisien kemiringan dengan nol) dengan asumsi *ceteris paribus*. Memperhatikan *p-value* dari *t-Statistics* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa secara parsial variabel infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan kajian-kajian yang dilakukan *World Bank* tentang pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan persamaan regresi data panel pada Tabel 4.1, variabel tenaga kerja yang menggunakan indikator angka kesempatan kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten hasil pemekaran dengan koefisien sebesar 0,295785. Nilai koefisien variabel tenaga kerja ini merupakan nilai yang terbesar dibanding koefisien yang dihasilkan oleh variabel lainnya. Koefisien lin-log tenaga kerja dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan jumlah orang yang bekerja 1 persen, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0029% (catatan: kita membagi estimasi koefisien kemiringan dengan 100) dengan asumsi *ceteris paribus*. Memperhatikan *p-value* dari *t-statistics* sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa secara parsial variabel tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah meskipun pengaruh

belanja pemerintah tidak signifikan, posisi belanja pemerintah tetap memiliki andil yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah kabupaten hasil pemekaran. Memperbesar alokasi belanja modal secara signifikan setiap tahun anggaran melalui perencanaan belanja modal rasional dan memberi dampak langsung terhadap peningkatan investasi pemerintah daerah serta pelayanan publik merupakan strategi yang dapat dilakukan guna perbaikan dan peningkatan realisasi belanja pemerintah.

Infrastruktur yang tersedia dengan baik akan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang/jasa yang pada akhirnya turut memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan jalan kabupaten merupakan cara yang dapat dilakukan agar memperlancar akses infrastruktur antar daerah sehingga diharapkan dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta melakukan pemeliharaan dan perawatan kualitas jalan yang sudah dibangun merupakan langkah yang dapat memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah pemekaran.

Penyelenggaraan program-program peningkatan sumberdaya manusia sehingga jumlah orang yang bekerja yang tersedia akan lebih memiliki potensi dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik atau dapat membuka sendiri lapangan kerja merupakan strategi atau langkah yang dapat ditempuh dalam peningkatan angka tenaga kerja yang dalam hal ini diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara bersama-sama, variabel belanja pemerintah, variabel infrastruktur dan variabel tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten pemekaran Provinsi Bengkulu yakni Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang. Secara parsial, variabel belanja pemerintah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten hasil pemekaran, sedangkan variabel infrastruktur dan tenaga kerja secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan

ekonomi kabupaten hasil pemekaran Provinsi Bengkulu.

perekonomian daerah pemekaran khususnya di Provinsi Bengkulu.

Saran

Memperhatikan simpulan yang juga merupakan hasil dari kajian ini, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Pemerintah daerah tetap perlu lebih memperbesar posisi belanja modal dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Dengan perkembangan proporsi alokasi belanja modal yang semakin baik pada anggaran pengeluaran pemerintah kabupaten hasil pemekaran, maka akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Meskipun secara kuantitas jumlah penduduk yang bekerja memberikan kontribusi yang tinggi bagi pertumbuhan ekonomi di kabupaten hasil pemekaran Provinsi Bengkulu, seyogyanya disertai dengan upaya peningkatan kualitas jumlah penduduk yang bekerja oleh pemerintah daerah, contohnya dengan memperbanyak pendidikan kewirausahaan melalui jalur non formal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan rentang waktu 10 tahun dengan periode data 2004 sampai 2013, sedangkan wilayah penelitian yakni kabupaten hasil pemekaran yang baru memekarkan diri pada tahun 2003 sehingga sulit untuk mengumpulkan data pada lima tahun pertama daerah pemekaran.

Rekomendasi untuk Penelitian Lebih Lanjut

- ❖ Diharapkan pada penelitian selanjutnya Kabupaten Bengkulu Tengah dimasukkan dalam daerah penelitian dengan rentang waktu penelitian yang lebih lama.
- ❖ Berdasarkan hasil penelitian yang dapat direkomendasikan adalah pembahasan mengenai perbedaan sebelum daerah penelitian melakukan pemekaran dan setelah melakukan pemekaran sehingga diharapkan dapat terlihat perbedaan dan keberhasilan daerah pemekaran yang telah memisahkan diri dari daerah induknya.
- ❖ Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah variabel bebas dalam penelitian sehingga dapat lebih memberikan gambaran keberhasilan

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah. 2009. *Pemetaan Permasalahan Pemekaran dan Konsep Alternatif Pemekaran Daerah*, dipresentasikan dalam *Focus Group Discussion (FGD)* Tim Pemekaran Daerah P2P-LIPI (DIPA 2009) di LIPI, Jakarta, 9 September 2009.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), United Nations Development Programme (UNDP). 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. Jakarta (ID): BRIDGE (Building and Reinventing Decentralised Governance) Bappenas.
- Baltagi BH. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*, Third Edition. John Wiley & Sons
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Yogyakarta (ID): BPFE.
- Candra EW. 2012. *Analisis Peranan Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2010*, [internet][diunduh 2015 Agustus 13]. Tersedia pada jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/147/113
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri, Decentralization Support Facility. 2011. *Laporan Hasil Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) 2011*. Jakarta (ID): Bank Dunia
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. 2011. *Deskripsi dan Analisis APBD 2010*. Jakarta (ID): DJPK
- Dumairy. 2004. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Familoni, K.A. 2004. *The Role of Economic and Sosial Infrastructure in Economic Development*. A Global View.
- Firdaus M. 2011. *Ekonometrika: Suatu Pendekatan Aplikatif* (Edisi Kedua), Jakarta (ID): Bumi Aksara
- Fitrani F, Hofman B, Kai K. 2005. *Unity in Diversity? The Creation of New Local Government in A Decentralising*

- Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. 41(1): 57–79.
- Gujarati DN. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika, Edisi Kelima, Jilid Dua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat P, Utomo WA, Harjito DA. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara*. [internet][diunduh 2015 Agustus 13]. p213-222. Tersedia pada <http://journa.uui.ac.id/index/php/JEP/article/viewFile/377/293>
- Nizar, Chairul, dkk. 2013. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. Pengaruh investasi dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi serta hubungannya terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia*. (Vol. 1, No. 2, Mei 2013). Pp 1-8.
- Kodoatie, R.J. 2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- Koswara E. 2001. *Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Jakarta (ID): Yayasan Pariba.
- Mangkoesebroto G. 2008. *Ekonomi Publik* (Edisi III). Yogyakarta (ID): BPFE
- Mankiw G. 2003. *Pengantar Ekonomi Jilid I*. Jakarta (ID): Erlangga
- Mubaroq MR, Remi SS, Muljarijadi B. 2013. *Pengaruh Investasi Pemerintah, Tenaga Kerja, Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten di Indonesia Tahun 2007-2010*. [internet][diunduh 2015 Agustus 13]. Tersedia pada <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/13/Jurnal-M-Rizal-M-M-UNPAD.pdf>
- Pamungkas C. 2007. *Pemekaran Wilayah Daerah, dan Desentralisasi Politik di Indonesia*. Jakarta (ID): USAID-DRSP-Percik-LIPI.
- Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah. 2005. *“Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah Periode 1999-2003”*, Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Ratnawati T, Jaweng RE. 2005. *Meninjau Kebijakan Pemekaran Daerah*. *Jentera*. 10 (3): 60
- Ratnawati. 2012. *Belanja Pemerintah, Kualitas Jalan, dan Korupsi*. KPPOD Brief. (Edisi Sept-Okt 2012).
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke Sembilan Belas. Alfabeta: Bandung.
- Sukirno S. 2004. *Makroekonomi Modern*, Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada.
- Sukirno S. 2006. *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan)*. Jakarta (ID): Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suparmoko M. 2002. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Suatu Pendekatan Teoritis*, Yogyakarta (ID): BPFE.
- Tambunan TH. 2001. *Industrialisasi di Negara Berkembang*, Jakarta (ID): Ghalia Indonesia.
- Tarigan R. 2012. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*, (Edisi VI), Jakarta (ID): Bumi Aksara.
- Todaro MP, Smith SC. 2011. *Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesebelas*, Jakarta (ID): Erlangga.
- Widarjono, Agus (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Yuliadi I. 2012. *Kesenjangan Investasi dan Evaluasi Kebijakan Pemekaran Wilayah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* (Volume 13 Nomor 2: Desember 2012). p 276-287.